

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEWUJUDKAN
DEMOKRASI BEBAS DARI POLITIK IDENTITAS PADA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK DI DKI
JAKARTA DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Tesis ini diajukan memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta



ALBERTUS ISWADI
No. Mhs.: 185202879/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2022**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Albertus Iswadi
Nomor Mahasiswa : 185202879
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Proposal Tesis : TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
MEWUJUDKAN DEMOKRASI BEBAS
DARI POLITIK IDENTITAS PADA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
SERENTAK DI DKI JAKARTA DAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M

01 Juli 2022

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M 24 Oktober 2022



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Albertus Iswadi
Nomor Mahasiswa : 185202879
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Proposal Tesis : **TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BEBAS DARI POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK DI DKI JAKARTA DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 25 November 2022

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. Hyronimus Rithi, S.H., LL.M	
2. Sekretaris	Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M	
3. Anggota	Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum	

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Hyronimus Rithi, S.H, LL.M

Mengesahkan
Dekan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Dr. Y. Murti Widyastuti, S.H., M. H

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Albertus Iswadi

Nomor Mahasiswa : 185202879

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul :

“TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BEBAS DARI POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK DI DKI JAKARTA DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila dikemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 Oktober 2022

Yang menyatakan:

ALBERTUS ISWADI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat dan anugerah kepada penulis, sehingga penyusunan tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Bebas dari Politik Identitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta” dapat diselesaikan.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Penelitian dan penulisan tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu dan mendorong penulis, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat dan yang saya kasihi:

1. Bapak Dr. Hyronimus Rithi, S.H, LL.M, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dan selaku Pembimbing I/ Penguji yang telah membantu memberikan bimbingan dan petunjuk bagi penulisan tesis ini;
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M selaku Pembimbing II/ Penguji yang telah membimbing dan sangat banyak memberikan petunjuk bagi penulisan tesis ini;
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum selaku Anggota/Penguji yang telah memberikan masukan dan petunjuk bagi perbaikan penyusunan tesis ini;

4. Bapak/Ibu dosen pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta;
5. Ayahku tercinta, Bapak Kiyat Notosucipto, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Ibuku terkasih, Maria Kasini yang telah merawat, mendidik, dan selalu mendoakan penulis dari kecil, namun dipanggil Tuhan ketika penulis sedang menempuh studi semester pertama Magister Ilmu hukum Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
7. Adik-Adikku dan Saudara-daudaraku yang selalu mengingatkan dan selalu mendukung penulis dalam setiap perjuangan penulisan tesis ini. Terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya dari penulis;
8. Teman-teman kantor hukum AFC & Partners yang ikut menemani dan menyemangati penulis dalam penulisan tesis ini, yaitu saudara Choirul Huda, Berkat, Fiko Suprpto, Matheus Nurlatu, Cahyono, Daniel, Shinta Dewi. Terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya dari penulis;
9. Ucapan terimakasih dan hormat penulis yang begitu besar kepada beliau, M.Y Esti Wijayati yang telah membantu penulis baik materiil maupun inmateriil sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
10. Bapak Bupati dan wakil Bupati Bantul, Teman-teman Yayasan Pusat Bantuan Hukum Projotamansari, teman-teman Posko EW Inisiatif dan teman-teman profesi yang menjadi teman diskusi terkait pengetahuan hukum di lapangan, terutama hukum kepemiluan dan perwujudan nilai-nilai demokrasi Pancasila;

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan dukungan dan bantuan hingga penulisan ini selesai. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan dunia Pendidikan khususnya pada bidang ilmu hukum, terkait hukum pemilihan.

Penulis,

ALBERTUS ISWADI

ABSTRAK

Penelitian hukum “Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Bebas dari Politik Identitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta”, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi pada pemilihan umum kepala daerah secara serentak di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam mewujudkan demokrasi yang dicita-citakan sehingga dapat mendorong negara secara maksimal agar bertanggung jawab untuk mewujudkan demokrasi bebas dari politik identitas pada pemilihan umum kepala daerah untuk masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realitas di lapangan atau kenyataan di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data berupa data primer yang merupakan data dari keterangan atau fakta yang diperoleh penulis secara langsung melalui penelitian lapangan dari lokasi penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu berupa hasil wawancara ataupun keterangan dari calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah atau tim kampanye calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah DKI Jakarta dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pihak-pihak terkait. Data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, internet, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara masih pasif dalam melakukan tanggungjawabnya terhadap penggunaan politik identitas untuk mewujudkan demokrasi bebas dari politik identitas pada pemilihan umum kepala daerah serentak di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: Tanggungjawab Negara, Demokrasi, Bebas dari Politik Identitas, Pemilukada Serentak.

ABSTRACT

The legal research “Responsibility of the state in realizing Democracy Free from Identity Politics in the simultaneous general election of regional heads in DKI Jakarta and the Special Region Of Yogyakarta”, aims to determine the implementation of democracy in the simultaneous regional head elections DKI Jakarta and the Special Region of Yogyakarta, the to know the responsibility of the state in realizing the aspired democracy so that it can encourage the state to the maximum to be responsible for realizing democracy free from identity politics in regional head elections for the future. This study uses an empiricial legal research type, which is carried out by examining the law in reality in the field or in reality in society. The approach used in this legal research is to use a statutory approach, a case approach, and a conceptual. The source of data is primary data which is data from information or facts obtained by the author directly through field research from the research locations mentioned above, namely in the form of interviews or information from candidates for regional heads and candidates for deputy regional heads or campaign teams for regional head candidates. And deputy regional head in the DKI Jakarta area and the province of the Special of Yogyakarta, and related parties. Secondary data are also used in this study namely books, internet, and laws and regulation. Data collection techniques in this legal writing research are carried out using primary data, namely by conducting interviews (interviews) and literature studies. Primary legal materials and secondary legal materials were analysed using the legal analysis method. The results of this study indicate that the state is still passive in carrying out its responsibilities in the use of identity politics to realize a democracy free from identity politics in the simultaneous regional head elections in DKI Jakarta and the Special Region of Yogyakarta.

Keywords : State Responsibility, Democracy, Freedom from Identity Politics, Simultaneous Regional Head Elections.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Negara	17
B. Tinjauan Tentang Demokrasi	31
C. Tinjauan Tentang Politik Identitas.....	45
D. Tinjauan Tentang Pemilukada Langsung dan Serentak.....	49
E. Landasan Teori	53
1. Teori Negara Hukum	53
2. Teori Demokrasi.....	59
3. Teori Kebhinnekaan.....	62
F. Batasan Konsep.....	65
BAB III. METODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian	67
B. Pendekatan.....	67

C. Jenis Data	69
D. Teknik Pengumpulan Data	71
E. Teknik Analisa Data	72
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	74
A. Hasil Penelitian	74
1. Pemilihan Umum	74
a. Pemilihan Umum Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat	74
b. Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi	77
c. Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	81
2. Lembaga-Lembaga Negara Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum	83
a. Lembaga Eksekutif	84
b. Lembaga Legislatif	85
c. Lembaga Yudikatif	86
d. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	88
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah	95
a. Sejarah perkembangan Pemilihan Umum Kepala Daerah	95
b. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak	101
4. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di DKI Jakarta	110
5. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Daerah Istimewa Yogyakarta	117
a. Pemilukada Serentak Kabupaten Sleman	123
b. Pemilukada Serentak Kabupaten Bantul	126
c. Pemilukada Serentak Kabupaten Gunungkidul	132
B. Pembahasan	136
1. Problematika Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak	136
a. Problematika Pelaksanaan Pemilukada Serentak di Indonesia	136
b. Problematika Pelaksanaan Pemilukada Serentak di DKI Jakarta	146

c. Problematika Pemilukada Serentak di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	149
2. Politik Identitas dalam Pemilukada Serentak.....	154
a. Politik Identitas	154
b. Ciri-ciri politik identitas.....	157
c. Jenis-jenis politik identitas.....	157
d. Faktor-faktor penyebab terjadinya politik identitas	160
e. Penggunaan politik identitas.....	161
f. Penggunaan politik identitas pada pemilukada serentak di DKI Jakarta.....	168
g. Penggunaan politik identitas pada pemilukada serentak di Daerah Istimewa Yogyakarta	169
h. Dampak penggunaan politik identitas pada pemilukada serentak	170
3. Tanggung Jawab Negara dalam pelaksanaan Pemilukada Serentak.....	175
a. Pengertian tanggung jawab negara	175
b. Bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan demokrasi bebas dari politik identitas pada pemilukada serentak.....	176
c. Pelaksanaan tanggung jawab negara dalam mewujudkan demokrasi bebas politik identitas pada pemilukada Serentak	180
d. Mewujudkan Pemilukada bebas dari politik identitas	202

1. Tanggung Jawab Negara	202
2. Tanggung Jawab Partai Politik	212
3. Tanggung Jawab Masyarakat	215
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	220
A. Kesimpulan	220
B. Saran	222
DAFTAR PUSTAKA	224
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	
1. Gambar 1. 1: Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2020-2024.....	125
2. Gambar 1.2 : Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020- 2024.....	130
3. Gambar 1.3 : Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul 2020-2024.....	134
4. Tabel 2. 1: Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Non APK Per 5 Desember 2020.....	150
5. Tabel 2. 2: Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Per 5 Desember 2020.....	150
6. Gambar 2. 3: Jumlah Pelanggaran pemasangan APK per Kabupaten dan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Per Kabupaten.....	150
7. Tabel 2.4: Jumlah APK yang melanggar di Kabupaten Sleman.....	151
8. Tabel 2.5: Jumlah APK yang melanggar di Kabupaten Bantul.....	151
9. Tabel 2.6: Jumlah APK yang melanggar di Kabupaten Gunungkidul.....	152